

DARI MARTABAT PROFESI HINGGA SERTIFIKASI : SEJARAH GURU DI JAKARTA (1965-2014)

Taufik

Ahmad Kosasih

Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Program Studi Pendidikan Sejarah

Universitas Indraprasta PGRI

Email: aseng.kosasih@gmail.com taufik@gmail.com

Abstrak

Peran dan fungsi guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar disekolah memiliki peran yang cukup sentral. Tidak hanya menjadi seorang operator dalam kegiatan belajar mengajar, guru juga menjadi agensi pemerintah dalam menerapkan arah dan kebijakan politik dari pendidikan nasional. Tercatat sejak masa pemerintahan Orde Lama hingga berakhirnya pemerintahan Orde Baru, guru lebih banyak terjebak dalam kemelut politik hingga persoalan teknokratis. Sehingga pada perkembangannya peran guru yang seharusnya dapat maksimal dalam kegiatan belajar mengajar, harus menghadapi berbagai macam persoalan yang berangkat dari luar sektor pendidikan. Selain berbagai persoalan yang dihadapi dalam menjalankan kewajiban mengajar, selama perkembangannya kaum guru belum mendapatkan banyak perhatian, dalam hal tingkat kesejahteraannya.

Keyword : Sejarah Guru, di Jakarta, 1965-2014

PENDAHULUAN

Penulisan sejarah yang mengambil tema mengenai sejarah pendidikan di Indonesia, masih kurang mendapatkan perhatian dari para sejarawan. Meskipun ada yang menulis sejarah pendidikan umumnya masih terjebak dengan tema-tema besar, seperti peran kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dalam menjalankan dunia pendidikan di suatu daerah. Bahasan-bahasan lain, sepertinya hanya menyinggung pendidikan hanya sepintas, seperti pertumbuhan kota, pers dan kelompok elite yang salah satunya dipengaruhi oleh pendidikan (Sarkawi B. Husain, 2015; Taufik Abdullah, 1970; Robert V. Niel, 2009). Belum ada satupun kajian sejarah yang fokus membahas mengenai kelompok guru, sejarah kurikulum, pengaruh sekolah tertentu dalam perkembangan suatu wilayah dan sebagainya.

Sejatinya dunia pendidikan memainkan peran yang cukup strategis dalam perkembangan sejarah Indonesia karena khususnya di wilayah Jawa, pendidikan sudah berlangsung sejak masa-masa tradisional (Kerajaan) hingga masa kolonial, masa awal kemerdekaan dan kontemporer. Dalam dunia pendidikan yang telah berlangsung sejak masa lampau tersebut, peran komponen sosial, seperti “guru”, dapat kita letakkan dalam posisi yang cukup sentral. Selain sebagai pelaku/ praktisi lapangan dalam proses belajar mengajar, kehadiran status dan profesi guru dalam perkembangannya menjadi sebuah status atau profesi dapat menjadi upaya alternatif bagi masyarakat Indonesia dalam mendapatkan nilai-nilai ekonomis (ditengah semakin terdesak dan tertutupnya peluang untuk bekerja dalam sektor pertanian).

Sebelumnya pada masa-masa Kerajaan Tradisional (Hindu-Budha dan Islam), seorang yang “menjadi dan hendak menjadi” guru, haruslah berasal dari satu golongan atau lingkaran tertentu dalam stratifikasi masyarakat tradisional (menjadi seorang guru harus diakui dan ditetapkan oleh Kerajaan dan umumnya memiliki gelar Mpu, sedangkan untuk menjadi seorang guru/ kyai di sekolah Pesantren pada masa Islamisasi di Nusantara haruslah mendapatkan kesempatan belajar di Makkah atau Mesir). Sementara itu setelah pemerintah kolonial membangun infrastruktur pendidikan di tanah kolonial, profesi dan status sebagai guru, dapat diemban dan dijalankan oleh orang pribumi, meskipun tidak bergelar Mpu dan bukan dari keluarga Kerajaan.

Model pendidikan yang dilakukan pada masa Feodal-Tradisional (masa-masa Kerajaan) di Indonesia, keberadaan seorang guru hanya akan memberikan pengajaran kepada para anak-anak Raja dan Bangsawan. Seorang Guru pada masa feodal-tradisional diberikan fasilitas oleh Kerajaan berupa wilayah untuk tempat tinggal (umumnya dikenal dengan nama wilayah Perdikan) dan sejumlah pengikut untuk membantunya melakukan pekerjaan sehari-hari. Guru-guru pada masa itu memberikan pengetahuan mengenai sastra-kesenian, membaca hikayat dan kronik, bahkan hingga keterampilan olah tubuh dan ilmu kebatinan. Peraturan dan kebijakan tersebut pula yang kemudian bagi beberapa pihak difafsirkan sebagai upaya untuk memberikan dan memperkuat legitimasi dan posisi dari penguasa feodal-tradisional.

Sejak diperkenalkannya konsep pendidikan modern ala barat, status dan posisi sebagai seorang guru, mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pola mengenai status, fungsi dan kompensasi yang didapat oleh seorang guru, tidak lagi seperti pada masa-masa Kerajaan, dimana untuk

menjadi seorang guru harus mengikuti pendidikan formal yang diadakan oleh pemerintah kolonial, kemudian diberikan tugas mengajar sesuai dengan strata pendidikan dan tingkat sosialnya, serta diberikan kompensasi berupa “gaji” setiap bulannya sebagai imbalan bekerja sebagai guru, tanpa diberikan fasilitas berupa tempat tinggal dan para pengikut.

Melalui penerapan kebijakan Politik Etis, pemerintah kolonial secara serius mulai menjalankan kebijakan dunia pendidikan di tanah jajahan. Van Deventer sebagai salah satu pemikir dalam kebijakan politik Etis, mendapatkan mandat untuk menjalankan kebijakan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di Hindia-Belanda. Pada perkembangannya kegiatan penagajaran di Hindia-Belanda semakin berkembang, selaras dengan perubahan dalam bidang sosial-ekonomi dan politik. Puncaknya pada tahun 1912, terbentuk organisasi keguruan PGHB (Persatuan Guru Hindia-Belanda) sebagai perkumpulan yang memayungi para guru di Hindia-Belanda. Perkumpulan ini pada perkembangannya setelah masa kemerdekaan berubah menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia (25 November 1945 di Surakarta), yang menyatakan akan ikut membantu Republik Indonesia mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dalam bidang pendidikan dan pengajaran (PB-PGRI, 2011: 2).

Salah satu poin perjuangan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (selanjutnya akan disingkat dengan PGRI), ialah memperjuangkan hak dan nasib guru, serta kaum pekerja lainnya. Maksud dari memperjuangkan nasib dan hak ini ialah memperjuangkan hak-hak normatif kaum guru, dalam bidang sosial dan ekonomi kesejahteraan guru (PB-PGRI, 2011: 2). Kesadaran memperjuangkan hak-hak normatif, merupakan kesadaran yang umumnya muncul setelah masa kemerdekaan. Hal ini tidak terlepas dari upaya untuk

memperbaiki taraf kehidupan kaum guru, yang dipandang sangat memprihatinkan pada masa-masa penjajahan. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno (Orde Lama), situasi politik yang semakin menaik tajam, membuat organisasi PGRI, ikut masuk dalam pusaran arus politik. Beberapa pengurus PGRI, baik dalam tingkat pusat hingga daerah memasuki arena politik praktis. Tidak hanya para pengurus PGRI, bahkan guru-guru yang tidak bernaung dalam PGRI, juga cukup banyak yang terlibat dalam aktivitas politik praktis (<https://dediagussetiawan.wordpress.com/> diakses pada tanggal 28 September 2017; 14.00 WIB).

Pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965, para guru di Jakarta menghadapi cobaan yang besar, karena harus memperbaiki kehidupan sosial dan perekonomiannya yang sempat terpuruk (pada masa akhir Orde Lama). Bangkitnya Orde Baru (dibawah pemerintahan Presiden Soeharto), para guru umumnya setuju bahwa profesi sebagai guru, haruslah lepas dari kegiatan politik praktis. Guru harus independen, bersifat unitaristik dan tidak mendukung satu partai politik tertentu. Sekiranya hal inilah yang dikumnadangkan oleh para guru di Jakarta, yang berada dibawah naungan PB-PGRI. Peristiwa G30S, yang tersentarl di Jakarta, membuat para guru harus banyak berbenah, agar dapat kembali sesuai dengan khitahnya sebagai seorang pendidik yang mengabdikan pada bangsa dan Negara.

Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, yang memiliki idiologi pembangunan (developmentalism), keadaan dunia pendidikan di kota Jakarta, berangsur-angsur mulai membaik. Pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, cukup banyak sekolah-sekolah dan sarana pendidikan lainnya (seperti taman bacaan dan perpustakaan daerah dibangun). Melalui kebijakan pemerintahan pusat, yang

menjadikan kota Jakarta sebagai pilot project penyusunan dunia pendidikan nasional, kehidupan Guru menjadi lebih terjamin. Hal ini tidak terlepas dari diberikannya keleluasaan sektor swasta untuk masuk kedalam dunia pendidikan dan pengajaran di Jakarta. Tidak hanya sekolah-sekolah yang diperuntukan bagi masyarakat saja yang menjadi perhatian, sekolah-sekolah yang mencetak calon guru SPG (Sekolah Pendidikan Guru) juga dibangun oleh pemerintah di Jakarta. Hingga puncaknya insitusi seperti IKIP baik yang berada dalam naungan pemerintahan dan swasta juga diberikan izin untuk diselenggarakan.

Dengan dikembalikannya posisioning guru sebagai wakil terdepan dalam pembangunan, dan diberikannya kemudahan serta fasilitas dan sarana prasaran untuk para guru dan calon guru, membuat posisi atau status sebagai guru menjadi sangat bernilai. Persepsi masyarakat terhadap guru dan kaum pengajar ini mendapatkan apresiasi dan penghormatan yang besar dari masyarakat, khususnya di Jakarta (wawancara dengan bapak Drs. H. Harun, 12 September 2017). Perubahan sosial yang semakin cepat di kota Jakarta, khususnya dalam bidang ekonomi, pasca berjalannya ekonomi industry, perbankan, jasa dan transportasi, memberikan dampak yang kurang baik bagi posisi, status dan profesi seorang guru.

Profesi seorang guru tidak lagi dipandang sebagai profesi yang dapat memberikan jaminan asa depan, karena dalam kenyataannya pendapatan mejadi seorang guru, sangatlah jauh dari profesi-profesi dalam bidang industry, perbankan, jasa dan transportasi. Masyarakat Jakarta, yang semakin mengejar sisi materill, memandang bahwa profesi diluar guru lebih dapat mendatangkan pendapatan yang lebih besar dan memberikan efek terhadap peningkatan mobiltas sosial yang signifikan. Drs. H. Harun menjelaskan bahwa pendapatan sebagai seorang guru, pada

pertengahan tahun 1980-an, sangat jauh berbeda dengan para pegawai pemerintahan dan sektor swasta. Keadaan ini yang banyak membuat para generasi muda enggan untuk memilih profesi sebagai guru, dan memilih untuk bekerja di sektor non-pendidikan (wawancara dengan bapak Drs. H. Harun, 12 September 2017).

Apresiasi masyarakat yang semakin merendah dan lemahnya perjuangan organisasi guru pada masa Orde Baru, karena kuatnya kontrol pemerintahan Orde Baru terhadap organisasi-organisasi massa, mendatangkan situasi yang kurang menguntungkan bagi kelompok guru di Jakarta. Situasi semakin membaik bagi kaum guru, manakala tumbangnya pemerintahan Orde Baru menjelang akhir tahun 1998. Melalui gerakan Reformasi, pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dipaksa untuk mengundurkan diri. Era demokrasi terbuka yang menjadi slogan pemerintahan era Reformasi, membuat para guru, khususnya di kota Jakarta semakin lantang untuk memperbaiki taraf kesejahteraannya. Melalui penyusunan Undang-Undang Guru dan Dosen No. 20 Tahun 2003, profesi sebagai guru dicoba untuk diperbaiki oleh pemerintah, dan diapresiasi dengan pemberian tunjangan bagi guru, yang dikenal program Sertifikasi Guru.

Ganjaran dalam bentuk pemberian tunjangan sertifikasi kepada guru, baik yang berada dibawah naungan lembaga pendidikan negeri dan swasta, dimaknai oleh pemerintah era Reformasi sebagai upaya untuk membantu memperbaiki peningkatan taraf kesejahteraan kaum guru di Indonesia, dan bentuk apresiasi, serta penghormatan bagi kaum pendidik dan pengajar. Meskipun pada prakteknya program sertifikasi guru ini, dilakukan pada tahun 2007 (pasca terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan), guru-guru yang bertugas di kota Jakarta, menjadi guru-guru yang

pertama kali mendapatkan dan menikmati program tersebut dalam skala nasional.

PEMBAHASAN

Arah Politik Pendidikan Nasional Masa Orde Lama Hingga Masa Orde Baru

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945, situasi sosial dan keamanan di Pulau Jawa belum mencapai situasi yang kondusif. Situasi tersebut muncul karena kehadiran Sekutu yang membawa kembali kekuatan sipil dan militer Kerajaan Belanda, untuk kembali berkuasa di Indonesia. Selain itu juga cukup banyak gangguan keamanan dalam negeri, khususnya di Pulau Jawa yang disebabkan oleh perlawanan dan pemberontakan di daerah-daerah terhadap pemerintah pusat. Ditengah-tengah keterbatasan (gangguan dalam kehidupan sosial dan pemulihan ekonomi yang berjalan lambat), pemerintah Republik Indonesia tetap berupaya untuk membangun dan menjalankan amanat kemerdekaan berupa pelaksanaan dunia pendidikan nasional (PB PGRI, 2011: 2).

Melalui serangkaian pergantian pejabat dalam bidang kependidikan nasional, pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1948 berhasil menyusun Rencana Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran. Rencana Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran tersebut, kemudian di revisi dan diperbaharui setelah Agresi Militer Belanda ke-II dan Pemerintah Republik Indonesia kembali menjalankan kepemimpinan nasional di Yogyakarta. Pokok-pokok rencana pendidikan dan pengajaran tersebut meliputi: ruang lingkup pelaksanaan pendidikan nasional antara Formal dan Non-Formal; pemberian mata pelajaran agama di sekolah; bahasa pengantar (bahasa Indonesia); peran sektor swasta dalam keikutsertaannya dalam dunia pendidikan nasional; serta yang utama adalah

penetapan tujuan dari pendidikan nasional di Indonesia.

Melalui serangkaian perdebatan panjang di dalam parlemen dan mendapatkan kritik serta saran dari berbagai tokoh-tokoh ditingkat lokal/ daerah, maka pada tahun 1950, Indonesia memiliki Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran yang pertama. Undang-undang ini disahkan pada saat berdirinya Republik Indonesia Serikat (dibawah pimpinan Presiden Soekarno) dan Republik Indonesia dibawah pimpinan Perdana Menteri Dr. A. Halim. Semenjak disakannya Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia (pasca penyatuan RIS dan RI) membangun infrastruktur pendidikan berupa gedung-gedung sekolah dan pengajaran tinggi, penyediaan tenaga pengajar dan perencanaan pembiayaan pendidikan dan pengajaran.

Antusias terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di Indonesia tidak hanya diperlihatkan oleh pemerintah semata, akan tetapi masyarakat juga merespon secara positif penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tercatat melalui beberapa sumber menjelaskan bahwa jumlah peserta didik yang mengikuti Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama (SLP) dan Sekolah Lanjutan Atas (SLA) semakin meningkat. Peningkatan antusias rakyat Indonesia terhadap dunia pendidikan nasional, tidak hanya berlangsung dalam level pendidikan dasar hingga tingkat Sekolah Lanjutan Atas (SLA), peningkatan permintaan akses dan pelayanan pendidikan untuk tingkat Perguruan Tinggi juga terjadi. Sejak pertengahan tahun 1950-an, cukup banyak lembaga Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang muncul dan beroperasi di masing-masing daerah di Pulau Jawa.

Antusiasme yang cukup tinggi baik dari pemerintah maupun masyarakat secara umum, tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran menghadapi kendala dalam

bidang pemenuhan infrastruktur. Jumlah bangunan yang diperuntukan bagi sekolah-sekolah, tidak sebanding dengan jumlah calon peserta didik. Guna menghadapi hal ini, pemerintahan Soekarno mengusahakan pembangunan gedung-gedung baru dan menyewa rumah-rumah penduduk untuk dijadikan sekolah (Darmawan, Tanpa Tahun: 60). Persoalan yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan aktivitas pendidikan dan pengajaran, tidak hanya dalam level pemenuhan infrastruktur sekolah. Kebutuhan sumber daya manusia dalam mencetak guru-guru baru juga menghadapi kendala, maka dari itu pemerintahan Soekarno membuat keputusan berupa pendidikan dan pelatihan bagi calon-calon guru.

Kebijakan mencetak guru-guru pada masa pemerintahan Soekarno, dikenal dengan nama KPKPKB (Kursus Pengajar Untuk Kursus Pengantar Kepada Kewajiban Belajar). Pelaksanaan peraturan ini diberikan kepada individu yang hendak menjadi guru dan berada dalam naungan pemerintah. Bagi para individu yang hendak mengikuti program ini diwajibkan telah berusia 15-18 tahun, serta terikat kontrak dengan pemerintah dan mendapatkan tunjangan dari pemerintah sebesar Rp. 85,-. Pelaksanaan kebijakan ini, telah membuat pekerjaan sebaga pengajar (guru), mulai mendapatkan status sosial yang baik dalam kehidupan masyarakat (Keputusan Menteri Pendidikan No. 5033/F tertanggal 5 Juni 1950; Darmawan, Tanpa Tahun : 61).

Melalui pembukaan program KPKPKB tersebut, pemenuhan kebutuhan guru-guru di Indonesia secara bertahap mulai berjalan, akan tetapi untuk meningkatkan kualitas guru-guru yang sudah melewati program KPKPKB pemerintah membuka perguruan tinggi bagi calon pendidik. Perguruan tinggi bagi calon guru-guru tersebut dikenal dengan nama PTPG, yang pada perkembangannya dibuka di beberapa

daerah, yakni: Bandung, Malang, Bat Sangkar dan Tondodano (Darmawan, Tanpa Tahun : 62).

Pertumbuhan dan perkembangan dunia pendidikan nasional di Indonesia, yang sejak semula perjalanannya selalu dipenuhi dengan halangan dan rintangan (dalam sosial-politik hingga keamanan), menghadapi perubahan yang cukup mendasar manakala Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden di tahun 1959. Pertikaian politik dan kekuasaan di tingkat parlemen, hingga level lembaga militer, membuat tingkat efektivitas perjalanan pemerintahan selalu terhambat. Cukup banyak pemimpin nasional baik sipil maupun militer menilai situasi tersebut menghambat jalannya pemerintahan nasional. Melalui dukungan beberapa pihak parlemen dan militer maka Presiden Soekarno mengembalikan UUDS kembali ke UUD 1945 dan menjalankan paradigma politik yang cukup terkenal yakni Manipol-Usdek (Manifesto Politik, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia).

Dengan beralihnya paradigma politik nasional dari demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin (Manipol-Usdek), arah dan tujuan pendidikan nasional, juga ditekankan untuk mendukung paradigma Manipol-Usdek tersebut. Tujuan utama pendidikan yang berorientasi manipolis adalah menciptakan manusia-manusia Indonesia yang memiliki semangat patriotik, berjiwa Pancasila dan memiliki cita-cita sosialisme (Ketetapan No. II/ MPRS 1960, lampiran A Bab 1 pasal 21). Orientasi tersebut kemudian diturunkan kedalam 7 langkah yakni: menertibkan aparatur dan usaha-usaha Kementrian PP dan K; Menggiatkan kesenian; Mengharuskan usaha halaman; Mengharuskan penabungan; Mewajibkan usaha-usaha koperasi; Mengadakan kelas masyarakat dan Membentuk regu kerja di

kalangan SLA dan Perguruan Tinggi (Instruksi Menteri Muda PP dan K, No. 1/1959 Tentang Sapta Usaha Tama).

Orientasi tujuan dan kebijakan yang diberlakukan pada masa pemerinatah Orde Lama, sejatinya menggambarkan mengenai arah dan tujuan pendidikan nasional yang diharapkan dapat menopang tujuan-tujuan politik nasional. Melalui penerapan Undang-undang hingga instruksi Mentri PP dan K, arah dan tujuan pendidikan nasional pada masa pemerintahan Soekarno, dijalankan. Proses ini terus berlanjut hingga berakhirnya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya akan dibahas dalam sub-bab ini mengenai bagaimana pemerintahan pada masa Presiden Soekarno, memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk menjadi guru.

Pada awal-awal kemerdekaan di tahun 1945 hingga masa-masa perang kemerdekaan di tahun 1949, perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan nasional tidak dilakukan secara penuh. Mengingat pada masa-masa ini di pulau Jawa khususnya sednag mengalami banyak gangguan politik dan keamanan, sehingga segenap tenaga dan perhatian lebih banyak dicurahkan untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih.

Situasi yang menghimpit keberlangsungan pemerintahan Republik Indonesia (serangan agresi militer Belanda dan pemberontakan-pemberontakan daerah), tidak juga menyurutkan antusias pemerintah dan masyarakat untuk menyeleggarakan pendidikan dan pengajaran. Masyarakat Indonesia tetap menghendaki proses belajar dan mengajar dalam lembaga-lembaga pendidikan tetap di dijalankan. Berdasarkan usul dan keinginan yang kuat dari masyarakat, maka pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno tetap membuka jenjang pendidikan tingkat sekolah rakyat. Guna memenuhi kebutuhan guru-guru yang akan bertugas mengajar di tingkat

sekolah rakyat, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan penerimaan guru dengan bekal ijazah sekolah rakyat yang disertai surat keterangan dari kepala desa setempat.

Para calon-calon guru yang telah lulus seleksi administrasi tersebut, kemudian diberikan pelatihan selama satu tahun untuk dapat meningkatkan kualitas mereka sebagai bekal untuk mengajar di sekolah rakyat. Kegiatan ini berlangsung hingga tahun 1950, dimana kemudian pada tahun 1950 juga telah banyak menghasilkan banyak para lulusan-lulusan sekolah rakyat. Semakin banyaknya para siswa yang lulus dari sekolah rakyat, memberikan dorongan bagi pemerintah untuk segera menyelenggarakan pendidikan tingkat lanjut. Dengan banyak dibukanya pendidikan tingkat lanjut (SLP), maka kebutuhan guru untuk mengajar di sekolah-sekolah tingkat lanjut pertama (SLP), harus juga dipenuhi oleh pemerintah, begitu juga hingga sekolah lanjut atas (SLA).

Pemerintahan Presiden Soekarno kemudian membuat aturan-aturan yang terkait dengan tata-cara penerimaan calon-calon guru untuk tingkat sekolah dasar hingga sekolah lanjut atas (SLA). Peraturan tata-cara penerimaan calon-calon guru tersebut, tertuang dalam Bab X, Undang-Undang No.4 tahun 1950, serta No. 12 tahun 1954. Peraturan-peraturan tersebut menekankan dua hal pokok, yakni: bahwa syarat utama untuk menjadi guru selain memiliki ijazah, juga harus sehat secara jasmani dan rohani; Dalam menjalankan tugasnya (mengajar) disekolah, para guru harus menghormati tiap-tiap aliran agama atau keyakinan hidup.

Setelah peraturan mengenai tata-cara penerimaan guru disusun oleh pemerintah, peraturan lain yang kemudian disusun adalah berkaitan dengan tingkat kesejahteraan (pendapatan) para guru. Pemerintahan era Soekarno membuat peraturan tentang pendapatan guru, yang disesuaikan dengan

peraturan gaji pegawai negeri. Berdasarkan keputusan peraturan mengenai kesejahteraan guru yang disesuaikan dengan gaji pegawai negeri, maka tingkat kesejahteraan guru sesuai dengan gaji/ pendapatan para pegawai negeri diluar bidang kependidikan (Umasih, 2008: 59).

Kehidupan Guru-Guru di Jakarta Pada Masa Pemerintahan Orde Baru

a. Transisi Dunia Pendidikan Nasional Dari Pemerintahan Orde Lama Menuju Pemerintahan Orde Baru

Memasuki periode pertengahan tahun 1960-an, situasi politik di Indonesia semakin memanas, pertentangan kekuatan-kekuatan politik di dalam negeri (antara kelompok sosialis-komunis dengan kelompok religius dan nasionalis). Dapat dikatakan pula bahwa situasi ini juga didorong atas dasar situasi internasional yang, menempatkan kekuatan leiberalisme-kapitalis (Amerika Serikat dan sekutunya), menghadapi kekuatan sosilaisme komunis (Uni Soviet dan sekutunya). Indonesia sebagai salah satu negara-negara di Asia Tenggara, tidak dapat melepaskan diri dari dua pertarungan ideologi besar pasca meningkatnya eskalasi perang dingin (antara Amerika Serikat dan Uni Soviet).

Partai Komunis Indonesia yang berhasil menjadi salah satu partai dengan pengikut yang cukup banyak pada pemilu tahun 1955, berupaya untuk menghimpun lebih banyak kekuatan massa, khususnya kekuatan massa pekerja di Indonesia. Organisasi-organisasi profesi atau serikat pekerja, merupakan sasaran utama bagi Partai Komunis Indonesia (kemudian akan disingkat saja menjadi PKI) sebagai calon basis massanya. PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) adalah organisasi yang menaungi para guru-

guru di Indonesia, yang memiliki anggota cukup besar, merupakan salah satu target utama untuk dikuasai oleh PKI.

Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh DN Aidit memiliki keinginan yang kuat untuk menguasai PGRI, hal ini dapat dilihat melalui bagaimana PKI berupaya untuk merebut kursi pimpinan utama di PGRI. PKI yang mendukung Soebandri sebagai calon ketua umum PGRI, berupaya untuk melengserkan Ketua Umum PGRI Subiadinata pada Kongres ke-X PGRI di Jakarta tahun 1962. Kekuatan PKI di dalam tubuh organisasi PGRI memainkan isu tentang gerakan anti revolusioner dan anti Manipol yang dilakukan oleh Ketua Umum Subiadinata. Meskipun pada akhirnya hasil kongres ke-X tahun 1962 di Jakarta, kekuatan PKI tidak dapat melengserkan Ketua Umum Subiadinata, PKI tetap menyerukan kepada para anggota dan kader-kadernya di dalam tubuh organisasi PGRI, untuk melakukan aksi-aksi dan pemogokan kerja.

Upaya penggalangan massa yang dilakukan oleh PKI di dalam tubuh organisasi PGRI, semakin mendapatkan dorongan manakala situasi ekonomi Indonesia semakin terpuruk disaat memasuki tahun 1965. Para kader dan anggota Pki yang berada dalam tubuh organisasi PGRI, memunculkan isu-isu mengenai tingkat kesejahteraan guru-guru yang semakin rendah karena dipimpin oleh para peminan yang anti revolusi dan anti Manipol. Pertarungan antara massa pendukung PKI dalam tubuh organisasi guru, juga terjadi dalam level pimpinan elite di Kementerian P dan K.

Menteri Prijono yang saat itu menjabat sebagai Menteri P dan K, yang

didukung oleh kekuatan PKI, menyingkirkan beberapa pembantu menteri dan pejabat tinggi di Kementerian P dan K. Beberapa pejabat tinggi di Kementerian P dan K, serta pembantu Menteri dicopot oleh Menteri Prijono, karena dianggap tidak sejalan dengan tujuan Revolusi dan Manipol. Apa yang dilakukan oleh Menteri Prijono, seolah-olah mendapatkan restu dari Presiden Soekarno. Karena pada tahun 1964 pada saat Reshuffle kabinet, Presiden Soekarno tetap mempertahankan Menteri Prijono sebagai Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui uraian situasi organisasi guru PGRI pada masa pertengahan tahun 1960-an, kita mendapatkan gambaran mengenai situasi sosial para guru-guru ditengah kemelut politik.

Pada tahun 1965 terjadilah sebuah peristiwa yang besar bagi sejarah bangsa Indonesia, dimana kehidupan politik nasional mencapai titik puncaknya dengan terjadinya peristiwa G-30S. Peristiwa penculikan dan pembunuhan para pejabat Angkatan Darat tersebut, kemudian memberikan imbas kepada upaya pembersihan anggota-anggota PGRI yang dinilai sebagai karde, anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia. Pasca peristiwa G-30S dan ditolaknya Laporan Pertanggung Jawaban Presiden Soekarno pada tahun 1966 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, menandai berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno. Dengan mundurnya Presiden Soekarno dari pentas politik nasional, terjadi perubahan kepemimpinan nasional kepada Presiden Soeharto.

Pergantian kepemimpinan nasional kepada Presiden Soeharto, memberikan dampak terhadap arah kebijakan pelaksanaan kehidupan

berbangsa dan bernegara. Pemerintahan Orde Baru yang menjadi sebutan bagi pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, menempatkan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai paradigma politiknya. Tujuan ini menjadi semakin nyata manakala dituangkan kedalam ketetapan MPRS tahun 1966 yang menekankan tujuan pendidikan nasional untuk menghasilkan manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan dan isi UUD 1945 (Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1966).

Pemerintahan Orde Baru yang menekankan kehidupan ekonomi sebagai panglima (pemerintahan Orde Lama menjadikan politik sebagai panglima), kemudian merumuskan garis-garis besar kebijakan penataan ekonomi Indonesia melalui kebijakan Repelita. Memasuki pelaksanaan Repelita I ditahun 1969, pemerintah Orde Baru berupaya untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pengembangan pendidikan nasional. Berdasarkan rumusan para pakar pendidikan pada masa pemerintahan Orde Baru, diputuskan bahwa arah pendidikan nasional Indonesia harus dapat mencapai : keberhasilan pelaksanaan pendidikan ketika peserta didik dapat menjadi tenaga kerja; masyarakat harus dibangun menuju masyarakat yang rasional; pelaksanaan pendidikan dan pengajaran harus memberikan kesempatan yang luas bagi pendidikan tekni dan kejuruan; harus terdapat perbaikan dalam metode mengajar (khususnya penggunaan buku-buku) dan terdapat upaya untuk meningkatkan mutu guru-guru di Indonesia (Tilaar, 1995: 116; Umasih, 2008: 90).

Upaya peningkatan mutu dan kualitas guru yang dicanangkan oleh pemerintahan Orde Baru, menjadikan semacam sinyal bahwa para guru-guru akan sangat diberikan perhatian lebih oleh pemerintah. Hal ini bukanlah satu hal yang berada diluar ramalan, mengingat pemerintah Orde Baru melalui kebijakan pembangunan (Repelita) lebih mengutamakan stabilitas kehidupan sosial dan politik dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah Orde Baru sepertinya belajar dari kesalahan pendahulunya (pemerintah Orde Lama), bahwa upaya untuk melakukan pembanguana serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, harus pula disertai dengan jaminan dalam kehidupan ekonomu, sosial dan politik.

b. Kebijakan Rekrutasi Guru Pada Masa Pemerintahan Orde Baru

Pada masa pemerintahan Orde Baru tujuan politik nasional yang diarahkan untuk menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen, pada perkembangannya bersinggungan dengan dunia pendidikan nasional. Pada tahun 1973, dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan bahwa pembangunan dalam bidang pendidikan di dasarkan atas falsafah negara (Pancasila), untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keterampilan tanggung jawab dan memiliki nilai tenggang rasa dan demokrasi sesuai dengan yang termaktub dalam UUD 1945 (TAP MPR No. IV/MPR/1973 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara) .

Mersepon apa yang ditetapkan oleh pemerintahan Orde Baru dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), organisasi profesi guru PGRI juga menyatakan akan terlibat secara aktif dalam mesukseskan tujuan pemerintah. Pernyataan untuk terlibat secara aktif dalam mesukseskan kerja-kerja

pemerintah dalam bidang pendidikan nasional, dinyatakan oleh Pengurus Besar PGRI dalam hasil kongres PGRI ke-13, pada November 1973. Hasil kongres PGRI ke-13 tersebut merumuskan 11 pasal yang diarahkan untuk menopang kerja pemerintah dalam bidang pendidikan, diantaranya adalah (Butir-Butir Hasil Kongres PGRI ke-13, 21-25 November 1973 di Jakarta):

1. Pemberantasan buta huruf
2. Pengembangan penelitian pendidikan
3. Pengembangan mutu pendidikan sekolah dasar
4. Pembinaan pendidikan sekolah lanjutan umum dan kejuruan
5. Peningkatan pendidikan teknologi dan kejuruan
6. Peningkatan pendidikan guru
7. Pembinaan Perguruan Tinggi
8. Peningkatan pendidikan masyarakat dan orang dewasa
9. Pengembangan kebudayaan nasional
10. Peningkatan kegiatan olah raga
11. Pengembangan pendidikan

Apa yang ditetapkan oleh organisasi PGRI dalam kongres ke-13 tahun 1973 tersebut, menunjukkan bahwa kelompok profesi guru akan senantiasa mengikuti apa yang telah diputuskan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan nasional. Hal ini juga berarti bahwa para guru akan siap untuk diorganisasi oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Berkaitan dengan pengorganisasi guru yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi guru pada jenjang pendidikan tertentu. Sebagai contoh untuk menjadi guru pada Sekolah Lanjutan Pertama (SLP kemudian menjadi SLTP), seorang guru harus memiliki kualifikasi pendidikan jenjang B1 dan lulusan sarjan

muda dari perguruan tinggi. Sementara itu untuk menjadi seorang guru Sekolah Lanjutan Atas (SLA kemudian berubah menjadi SLTA) seorang guru harus memiliki kualifikasi pendidikan sarjana muda dari perguruan tinggi. Syarat lainnya untuk menjadi seorang guru yang akan berada dalam naungan birokrasi pegawai negeri, pemerintah Orde Baru mewajibkan para guru memenuhi persyaratan sesuai peraturan pengangkatan pegawai negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor. 10 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil).

Kebijakan untuk melakukan rekrutasi guru-guru bagi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran disekolah-sekolah, hingga seluruh level/ tingkat sekolah umumnya sangat berbeda-beda antara satu provinsi dengan yang lain pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru, rekrutasi guru-guru yang akan mengajar di sekolah-sekolah di Jakarta (khususnya sekolah Negeri), harus memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan (sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor. 10). selain memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan, para guru-guru lulusan IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) harus memenuhi syarat indeks prestasi studi yang telah ditentukan. Bagi calon-calon guru yang hendak mengajar di kota Jakarta, pemerintah Orde Baru melalui Suku Dinas Pendidikan kota Jakarta, menentukan bahwa indeks minimum prestasi dalam studi (IPK) harus diatas angka 2,5 (Umasih, 2008: 100).

Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap calon-calon guru yang hendak mengajar pada sekolah-sekolah di Jakarta, sejatinya menjadi semacam bekal bagi guru untuk melakukan pekerjaannya yakni mendidik para siswa di sekolah. Sesuai dengan apa yang telah diputuskan dan ditanda tangani secara

bersama oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN), mewajibkan para guru-guru di Jakarta untuk melaksanakan beban tugas mengajar sebesar 24 jam / minggu (SKB No. 433/P/1994 Tentang Pelaksanaan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru).

Tugas utama yang dijalankan oleh para guru ialah melakukan transformasi ilmu dan pengetahuan kepada peserta didik, dengan kata lain ialah mengajar sejumlah bidang ilmu kepada peserta didik. Hal utama yang sangat diperhatikan pada masa pemerintahan Orde Baru berkaitan dengan tugas guru dalam mengajar ialah komposisi dan perbandingan antara guru dan murid. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran selain kualitas dan sarana prasarana yang cukup, juga harus diimbangi dengan rasio antara guru dan murid yang ideal.

Secara umum rasio ideal antara guru dan murid dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah adalah 1:14. Rasio ideal tersebut, pada kenyataan dilapangan sangatlah berbeda, mengingat antusias masyarakat Indonesia yang selalu meningkat dari tahun ke tahun untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sebagai contoh ialah rasio antara sekolah, guru dan murid pada tahun 1972. Menurut sumber, pada tahun 1972 jumlah sekolah SLTP di Indonesia mencapai 5.548 buah, sementara itu jumlah siswa mencapai angka 1.136.939 orang dan jumlah guru sebesar 78.123. Melalui data tersebut didapatkan bahwa jumlah 1:14,55, rasio antara guru dan siswa dalam level tingakat SLTP di Indonesia sudah mencapai posisi ideal (Nazir dalam Jurnal Suara Guru, No. 4 Mei 1975).

Sementara itu rasio antara guru dan murid yang ada dalam sekolah-sekolah di Jakarta dari tahun 1974 hingga tahun 1998, dapat dijabarkan melalui tabel berikut :

Tahun	Propinsi DKI Jakarta	
	Guru	Siswa
1974	7.524	138.889
1979	11.231	207.297
1984	18.744	345.262
1989	26.716	407.688
1994	35.532	542.225
1998	47.258	712.159

Sumber : (Biro Pusat Statistik Indonesia 1974 sampai 1998; Umasih, 2008: 121)

Berdasarkan data yang disuguhkan dalam tabel rasio antara guru dan murid di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 1974 hingga tahun 1998, kita dapatkan informasi mengenai kecenderungan naiknya angka jumlah murid dengan jumlah guru. Melalui data tersebut, jumlah rasio antara guru dan murid dalam setiap periode selalu dalam angka yang seimbang yakni diangka 1:14,99. Angka ini jelas memberikan gambaran yang cukup ideal bagi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di kelas, yang dilakukan oleh para guru.

Data lain yang didapatkan, berkaitan dengan guru dalam pelaksanaan pendidikan di kota Jakarta, pada masa pemerintahan Orde Baru ialah jumlah guru berdasarkan pembagian Pria atau Wanita. Terdapat pernyataan umum bahwa idealnya profesi sebagai guru diemban oleh seorang wanita, karena wanita dianggap sebagai sosok yang teliti, penuh kasih dan sayang dalam mendidik. Akan tetapi pendapat dan pernyataan ini akan sangat berbeda, dengan keadaan dilapangan (pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang dilakukan pada sekolah-sekolah di Jakarta).

Berikut ini akan diberikan data mengenai jumlah guru di Indonesia, dengan pembagian pria dan wanita :

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
-------	-----------	-----------	--------

N o		Oran g	%	Oran g	%	Oran g	%
1.	1972	20.95 6	81,9 7	4608	18,0 8	25.56 4	10 0
2.	1981/8 2	62.44 8	76,0 3	19.68 7	23,9 7	82.13 5	10 0

Sumber : (Biro Pusat Statistik Indonesia 1974 sampai 1998;
Umasih, 2008: 124)

Berdasarkan data yang didapat melalui Pusat Statistik Indonesia, jumlah guru di kota DKI Jakarta, yang mengajar dalam tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tngkat Atas (SLTA), berjumlah 7.988 orang. Jumlah tersebut terbagi atas laki-laki sebanyak 5.236 orang (65, 55%), sementara itu untuk perempuan sebnayak 2.752 orang (34,45%). Berdasarkan data tersebut, didapatkan gambaran bahwa jumlah guru yang mengajar di kota Jakarta, umumnya di dominasi oleh laki-laki. Jumlah guru wanita pada tahun 1982, hanya sebagian kecil dari jumlah guru laki-laki yang mengajar pada sekolah SLTA di kota DKI Jakarta.

Status Sosial dan Tingkat Kesejahteraan Guru Pada Masa Pemerintahan Orde Baru

Sebuah pekerjaan yang dilakukan, juga harus diperhitungkan mengenai kompensasi (pendapatan) yang akan diterima. Sekiranya pernyataan tersebut, bukanlah sebuah perumpamaan yang keliru, jika difikirkan oleh para guru-guru. Mengambil pilihan sebagai guru (mendidik dan mengajar para generasi muda bangsa) merupakan satu profesi yang sekiranya dapat dikatakan mulia. Beban besar yang menggantung di pundak para guru, sekiranya harus pula diberikan kompensasi (pendapatan) yang seimbang pula. Minilik bagaimana kompensasi (pendapatan) yang diterima oleh para guru pada masa pemerintahan Orde Baru, akan memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana gambaran kesejarhteraan guru-guru.

Pemerintahan Orde Baru melalui peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang dibuat, setidaknya telah menyatakan bahwa peran guru sangatlah

penting. Guru-guru merupakan ujung tombak bagi pemerintah Orde Baru, dalam merealisasikan tujuan politik nasional. Menciptakan manusia Indonesia yang seutuhnya sesuai dengan semangat Pancasila memiliki iman dan taqwa, serta memiliki kemampuan adaptif dan keterampilan dalam berhubungan dengan kemajuan teknologi merupakan satu pekerjaan yang cukup besar dan sulit.

Atas dasar pemahaman mengenai peran, fungsi serta tugas dan tanggung jawab yang cukup besar tersebut, maka pemerintahan Orde Baru membuat keputusan (peraturan dan perundang-undangan) yang berkaitan dengan pendapatan (tingkat kesejahteraan) bagi guru-guru. Setidaknya selama pemerinatah Orde Baru berkuasa, telah terjadi 5 (lima) kali perubahan dan penyesuaian pendapatan bagi guru-guru yang berada dalam naungan pemerintah (guru berstatus PNS). Tahun 1968, tahun 1977, tahun 1985, tahun 1993 dan tahun 1997 merupakan tahun-tahun yang menjadi tonggak dalam upaya memahami kondisi kesejahteraan bagi guru-guru di Indonesia.

Sumber : (Umasih, 2008: 182); Berkaitan dengan pengklasifikasian golongan, sangat ditentukan oleh variabel : lama pengabdian dan

No	Tahun	Golongan			Keterangan
		II A	II B	III A	
1	1968	-	3.360*	3.100**	*perhitungan masa kerja 20 tahun **masa kerja 3 tahun
2	1977	21.200	26.900	34.100	
3	1985	55.000	66.900	81.000	
4	1993	110.000	129.000	150.000	
5	1997	182.900	204.800	241.800	

kepemilikan ijazah terakhir

Guna memahami tingkat kelayakan dari pendapatan berdasarkan tabel diatas, perlu juga diberikan pemahaman mengenai konteks zaman/ masa kebijakan tersebut di keluarkan. Pada tahun 1968, pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan pendapatan (gaji) bagi guru-guru sebesar Rp.3.360 (golongan II B) dan Rp.3.100 (golongan III A). Kebijakan pendapatan guru-guru dibawah naungan pemerintah (berstatus PNS) di tahun 1968, merupakan kebijakan yang menguntungkan bagi para

guru. Mengingat pada akhir tahun 1960-an hingga pertengahan tahun 1970-an, biaya kebutuhan hidup umumnya mencapai angka Rp. 1.000,-/ bulan. Melalui kebijakan sistem pendapatan yang demikian, cukup banyak para guru-guru yang memiliki perhiasan, hingga tabungan di lembaga keuangan-Bank (Wawancara dengan Bapak Drs. H. Harun, 04 November 2017; Umasih, 2008: 180).

Kebijakan pendapatan para guru-guru berdasarkan penyesuaian pendapatan/ gaji pada tahun 1977, mengalami perubahan atau peningkatan angka. Akan tetapi pada masa-masa ini, juga sedang terjadi pelemahan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Umasih (2008: 180) menjelaskan bahwa pada periode akhir tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an, di Indonesia sedang terjadi pelemahan ekonomi yang bersumber dari penurunan harga BBM internasional. Sementara itu menurut Drs. Harun (Wawancara dengan Bapak Drs. H. Harun, 04 November 2017), pada periode pelemahan ekonomi diakhir tahun 1970-an, cukup banyak guru-guru yang juga bekerja tambahan diluar profesi guru (tambahan diluar jam mengajar sebagai guru, semisal menjadi penjual buah, menjadi guru les, dan lain sebagainya).

Situasi ekonomi Indonesia yang semakin membaik selepas penurunan kehidupan ekonomi di akhir tahun 1970-an, memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menaikkan kembali angka pendapatan bagi guru-guru. Pada tahun 1985 kemudian tahun 1993, pemerintah melakukan penyesuaian pendapatan (gaji) bagi guru-guru yang berstatus guru Pegawai Negeri Sipil. Peningkatan pendapatan (gaji) yang diterima oleh para guru-guru (PNS) dan disertai peningkatan ekonomi Indonesia, memberikan kesempatan bagi para guru-guru untuk meingkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Drs. Harun, menjelaskan bahwa sejak tahun 1985 hingga pertengahan tahun 1990-an, cukup banyak para guru-guru yang telah memiliki tempat tinggal

(umumnya memiliki rumah Perumnas) dan kendaraan (motor) hasil dari peningkatan gaji dan peningkatan kehidupan ekonomi Indonesia (Wawancara dengan Bapak Drs. H. Harun, 04 November 2017).

Sementara itu penurunan taraf kesejahteraan hidup bagi para guru-guru menurun, pada saat memasuki akhir pemerintahan Orde Baru. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, akibat tingginya nilai tukar Dolar terhadap Rupiah, memberikan imbas terhadap penurunan tingkat kesejahteraan kaum guru. Selain krisis ekonomi, krisis dalam bidang politik dan pemerintahan, juga memberikan imbas terhadap kepastian dan jaminan kehidupan guru. Naiknya harga-harga bahan pokok, karena lemahnya sektor ekonomi Indonesia, menjadi semakin meruncing dengan ketidakstabilan dalam bidang politik dan keamanan. Pada masa penurunan kehidupan ekonomi di akhir tahun 1997 ini, cukup banyak guru-guru yang terlilit hutang (formal maupun non-formal), serta juga banyak guru-guru yang menjual aset-aset berharga seperti perhiasan dan kepemilikan tanah atau rumah (Wawancara dengan Bapak Drs. H. Harun, 04 November 2017).

Daftar Pustaka

Arsip Nasional

Instruksi Menteri Muda PP dan K, No. 1/1959 Tentang Sapta Usaha Tama

Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1966

TAP MPR No. IV/MPR/1973 Tentang Garis-

Garis Besar Haluan Negara

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor. 10 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

SKB No. 433/P/1994 Tentang Pelaksanaan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru

SK. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 26/ 1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru

Artikel

PB-PGRI. Sejarah Singkat Persatuan Guru Republik Indonesia., 2011.

Butir-Butir Hasil Kongres PGRI ke-13, 21-25 November 1973.

Darmawan, Wawan. Guru Tiga Zaman, Tanpa Tahun.

Nazir. “Beberapa Masalah Dalam Proyeksi Kuantitatif dan Kualitatif Kebutuhan Guru di Indonesia “, Suara Guru, 2 Mei XXVI Tahun 1975.

Buku

Abdullah, Taufik. 1970. *Schools and Politics : The Kaum Muda Movement In West Sumatra (1927-1933)*. Disertasi Program Doktorat Universitas Cornell.

Van Niel, Robert. 2009. *Munculnya Elite Modern*. Pustaka Jaya. Jakarta.

Husain, B. Sarkawi. 2015. *Sejarah Sekolah Makassar*. Inninnawa. Makassar.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Nuridin, Muhammad. 2004. *Kiat Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Primashopie.

PP No. 19 Th. 2005, *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Fokusmedia.

Syafruddin Nuridin dan Basyiruddin. 2003. *Guru Profesional dan implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Press.

Tafsir, Ahmad. 2001. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tilaar, H.A.R. 1995. *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta : Grasindo.

Penelitian

Umasih, 2008. *Pelaksanaan Kebijakan Jabatan Guru IPS SMP-SMAPada Sembilan Provinsi di Indonesia Era Orde Baru 1966-1998*. Disertasi Program Doktorat Universitas Indonesia.

Wawancara

Drs. H. Harun (Praktisi dan Mantan Pengurus PGRI Cabang Jawa Barat), 12 September 2017

Publikasi Elektronik

<https://dediagussetiawan.wordpress.com/>
diakses pada tanggal 28 September 2017; 14.00 WIB